PERAN MEDIASI DAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI

Emil Salim Siregar¹, Ardila Dwi Utari Br Sitorus²
emielsalimsrg1988@gmail.com¹, ardiladwiutari@gmail.com²
Universitas Asahan

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi fungsi mediasi dan arbitrase sebagai metode penyelesaian perselisihan investasi dalam konteks interaksi antara investor asing dan negara yang menjadi tujuan investasi, khususnya di Indonesia. Mediasi, sebagai suatu cara yang tidak melibatkan pengadilan, menyediakan keluwesan serta solusi yang bersifat kolaboratif untuk menjaga hubungan jangka panjang, namun memiliki kekurangan utama, yakni karakter tidak mengikat dari kesepakatan yang dihasilkan. Di sisi lain, arbitrase memastikan kepastian hukum dengan keputusan yang mengikat dan diakui secara internasional, tetapi dapat menimbulkan risiko terhadap kedaulatan negara jika keputusan tersebut bertentangan dengan kebijakan dalam negeri. Melalui analisis kasus, seperti Churchill Mining v. Indonesia dan sengketa mengenai kebijakan nikel yang diatur dalam UU Minerba 2020, penelitian ini mengungkap adanya ketegangan antara perlindungan hak investor dan prinsip kedaulatan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif yang menafsirkan masalah hukum. Studi ini merumuskan pertanyaan kritis tentang bagaimana efektivitas dan tantangan mekanisme mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa investasi serta sejauh mana mediasi dan arbitrase dapat menjembatani kepentingan investor asing dengan prinsip kedaulatan hukum Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi, Arbitrase, Sengketa Investasi, Kedaulatan Hukum, Indonesia.

Abstract: This research explores the function of mediation and arbitration as investment dispute resolution methods in the context of interactions between foreign investors and investment destination countries, particularly in Indonesia. Mediation, as a non-court method, provides flexibility and collaborative solutions to maintain long-term relationships, but has the major drawback of the non-binding character of the resulting agreement. Arbitration, on the other hand, ensures legal certainty with a binding and internationally recognized decision, but may pose risks to state sovereignty if the decision conflicts with domestic policies. Through the analysis of cases, such as Churchill Mining v. Indonesia and the dispute over the nickel policy stipulated in the Minerba Law 2020, this research reveals the tension between the protection of investor rights and the principle of legal sovereignty prevailing in Indonesia. This research is qualitative in nature with a normative research approach that interprets legal issues. This study formulates critical questions about how the effectiveness and challenges of mediation and arbitration mechanisms in resolving investment disputes and the extent to which mediation and arbitration can bridge the interests of foreign investors with the principle of Indonesian legal sovereignty.

Keywords: Mediation, Arbitration, Investment Disputes, Legal Sovereignty, Indonesia.

PENDAHULUAN

Interaksi dalam konteks sosial menciptakan dinamika di antara individu sebagai refleksi dari keragaman kepentingan manusia dalam menjalani hidup mereka. Dalam situasi ini, ada kemungkinan munculnya konflik, perbedaan pendapat, dan perselisihan di antara orang-orang tersebut karena adanya variasi dalam kepentingan yang ada.¹ Secara umum, semua individu menginginkan agar kehidupan sosial berlangsung secara seimbang dan mempertahankan kepentingan semua anggota. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencari solusi dalam mengatasi konflik dan perselisihan yang muncul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan. Dengan melihat dari penyebab awal sengketa, dapat dipahami bagaimana hukum telah berevolusi seiring waktu, bertujuan untuk membentuk sebuah sistem yang mendukung penyelesaian yang adil dan efisien terhadap perselisihan tersebut.

Dalam dunia ekonomi yang semakin terhubung secara global, investasi yang melintasi batas negara menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan pekerjaan. Namun, kerumitan interaksi antara investor luar negeri dan negara yang menerima investasi sering menimbulkan konflik yang muncul dari perbedaan kepentingan, kebijakan yang tidak jelas, atau perubahan aturan yang berdampak pada hak serta kewajiban setiap pihak.² Perselisihan investasi tidak hanya berpotensi merusak hubungan bisnis, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, adil, dan berkelanjutan guna mengurangi risiko dan menjaga lingkungan investasi yang baik.

Secara konvensional, penyelesaian konflik investasi bergantung pada proses litigasi di pengadilan lokal. Namun, metode ini sering kali dianggap tidak optimal karena dapat memunculkan bias yang menguntungkan kepentingan nasional dari negara penerima, terutama dalam kasus yang melibatkan lembaga pemerintah. Selain itu, proses litigasi yang berlangsung lambat, biaya yang tinggi, dan keterbatasan pengalaman hakim dalam menangani perkara kompleks antar yurisdiksi semakin memperburuk rasa ketidakpuasan pihak-pihak yang terlibat, terutama investor asing yang mencari kepastian hukum dan netralitas. Situasi ini menciptakan dorongan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan berfokus pada prinsip solusi yang saling menguntungkan.

Di sini, mediasi dan arbitrase muncul sebagai alat utama dalam sistem Penyelesaian Sengketa Investasi. Kedua metode ini termasuk dalam kategori Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diakui secara global, karena kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan multinasional tanpa terikat pada batasan hukum domestik. Mediasi, yang merupakan proses tanpa ikatan dan berfokus pada dialog kolaboratif, memberi kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan solusi inovatif dengan bantuan mediator yang netral.³ Di sisi lain, arbitrase, melalui keputusan yang mengikat dari arbiter yang bersifat independen, memberikan kepastian hukum yang dapat diimplementasikan secara internasional berkat adanya perjanjian global seperti Konvensi New York 1958 dan Konvensi ICSID 1965.

Perkembangan penting dalam praktik arbitrase investasi dimulai dengan hadirnya Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dan perjanjian multilateral seperti NAFTA yang sekarang dikenal dengan USMCA serta ECT atau Energy Charter Treaty. Dokumen-dokumen ini biasanya menyertakan klausul arbitrase sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa, yang mendorong peningkatan

¹ Rini Eka Agustina, "Efektifitas Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 263–72, <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>.

² King William and Moody Rizqy Syailendra, "Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional," *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 1982–90.

³ Frans Hendra Winarta, *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

jumlah kasus di lembaga seperti ICSID dan UNCITRAL. Namun, belakangan, kritik terhadap arbitrase investasi terutama yang berkaitan dengan transparansi, konsistensi keputusan, dan kesan "pro-investor" telah memicu upaya reformasi. Mediasi kini lebih banyak dianjurkan sebagai alternatif yang dapat mengurangi timbulnya konflik, menjaga hubungan jangka panjang, dan menghindari biaya yang tinggi terkait dengan arbitrase.⁴

Di sisi lain, mediasi menghadapi tantangan tersendiri, seperti kurangnya kekuatan mengikat dan ketergantungan pada itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat. Meskipun demikian, inisiatif seperti UNCITRAL Mediation Rules 2021 dan integrasi mediasi dalam kerangka ICSID menunjukkan usaha terencana untuk meningkatkan legitimasi mediasi dalam konflik investasi. Selain itu, praktik hibrida seperti arb-med-arb (kombinasi arbitrase dan mediasi) semakin diminati karena menggabungkan keunggulan masing-masing metode.⁵

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan mediasi dan arbitrase terlihat dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif serta keterlibatan dalam perjanjian investasi regional seperti ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Kasus sengketa seperti Churchill Mining v. Indonesia menyoroti pentingnya pemahaman tentang dinamika ADR dalam melindungi kedaulatan hukum nasional dan menarik minat investor asing. Eksplorasi fungsi mediasi dan arbitrase dalam resolusi konflik investasi bukan hanya penting dari sudut pandang teoretis tetapi juga dalam praktiknya. Kedua alat ini mencerminkan perkembangan sistem hukum internasional yang berupaya untuk menyeimbangkan hak-hak investor, kekuasaan negara, serta keadilan dalam prosedurnya. Kajian yang mendalam mengenai efisiensi, masalah, dan peluang mereka sangat penting untuk membangun ekosistem investasi yang tangguh di zaman ekonomi digital dan peralihan energi yang penuh tantangan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif yang menafsirkan masalah hukum. Studi ini merumuskan pertanyaan kritis tentang Bagaimana efektivitas dan tantangan mekanisme mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa investasi serta sejauh mana mediasi dan arbitrase dapat menjembatani kepentingan investor asing dengan prinsip kedaulatan hukum Indonesia. Para peneliti menggunakan sumber literatur seperti hukum dan doktrin hukum terkait tentang hukum arbitrase sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Agar penelitian ini dapat memberikan penyelesaian terhadap pemahaman tentang Peran Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dan Tantangan Mekanisme Mediasi dan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi

Dalam ranah interaksi antara investor asing dan negara yang menerima investasi, mediasi dan arbitrase muncul sebagai dua metode utama dalam menyelesaikan perselisihan, masing-masing dengan kelebihan dan tantangan tersendiri. Mediasi, yang merupakan metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa, menonjolkan sifat fleksibel dan kerjasama.⁷ Proses ini memungkinkan kedua pihak investor dan negara untuk merumuskan solusi yang di luar batas formal hukum, seperti

⁴ Asriani Khoirunnisa, Dede, Wagianto, "Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi Di Dunia Bisnis Islam," *Media of Law and Sharia* 5, no. 2 (2024): 88–100, <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/73/28>.

⁵ Khoirunnisa, Dede, Wagianto.

⁶ Rini Eka Agustina, "Efektifitas Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan."

⁷ Leonardo Richo Soemarto, "Mediasi Dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (Bits) Yang Melibatkan Indonesia," *Jurnal Darma Agung*, no. 6 (2023): 176–87, <https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3852>.

penyesuaian kontrak atau perubahan kebijakan, sementara tetap menjaga hubungan jangka panjang.

Sebagai ilustrasi, terdapat kasus sengketa sumber daya mineral di Indonesia, di mana mediasi berhasil mencegah peningkatan masalah ke fase arbitrase dengan menghasilkan perubahan kontrak yang menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, mediasi secara umum berlangsung lebih cepat (antara 3 hingga 12 bulan) dan lebih ekonomis dibandingkan dengan arbitrase.⁸ Namun, kelemahan utama mediasi terletak pada karakternya yang tidak mengikat. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi bisa gagal jika salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik, misalnya ketika pemerintah tidak bisa memenuhi janji karena adanya tekanan politik atau perubahan dalam kebijakan domestik. Dalam hal ini, di Indonesia, kurangnya regulasi yang khusus mengatur mediasi investasi juga menjadi hambatan, karena proses ini sering kali tergantung pada inisiatif yang bersifat sementara.

Di sisi lain, arbitrase menyediakan kepastian hukum melalui keputusan yang bersifat mengikat dan dapat diterapkan di seluruh dunia berkat perjanjian internasional seperti Konvensi New York 1958 dan ICSID. Sebagai contoh, dalam perkara Churchill Mining melawan Indonesia, keputusan arbitrase ICSID memaksa Indonesia untuk membayar kompensasi sebesar 340 juta USD. Arbitrase juga dianggap lebih adil karena menghindari keberpihakan pengadilan lokal yang mungkin mendukung negara yang menerima investasi. Namun, sistem ini mendapatkan kritik karena dianggap lebih menguntungkan investor, seperti terlihat dalam kasus Philip Morris melawan Australia, di mana hasil arbitrase dianggap membatasi kemampuan negara dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Biaya arbitrase yang sangat besar (mencapai jutaan dolar) dan lamanya proses (antara dua sampai tujuh tahun) juga menjadi beban bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi, karena banyak kasus ditangani secara tertutup, yang memicu kritik dari masyarakat sipil terkait masalah akuntabilitas dan implikasinya terhadap kebijakan publik.

Kompleksitas interaksi antara investor dan negara sering kali berasal dari ketegangan antara hak-hak investor, seperti perlindungan terhadap aset dan kepastian dalam regulasi, serta kedaulatan negara yang melibatkan hak untuk mengatur kebijakan publik.⁹ Sebuah contoh konkret dapat dilihat dalam perselisihan mengenai kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diatur oleh UU Minerba 2020 di Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong pengembangan industri hilir domestik tetapi dianggap melanggar jaminan stabilitas regulasi yang termaktub dalam kontrak investasi. Kasus ini menyoroti potensi konflik antara kebijakan dalam negeri dan ketentuan internasional dalam perjanjian investasi. Sementara itu, Omnibus Law Cipta Kerja Indonesia pada tahun 2020 menimbulkan kecemasan di kalangan investor terkait dengan perubahan regulasi yang tiba-tiba, meskipun pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini esensial untuk meningkatkan daya saing di bidang investasi.

Jika dianalisis, terdapat perbandingan jelas antara mediasi dan arbitrase. Mediasi lebih baik dalam aspek kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan dampak positif pada hubungan antara kedua belah pihak, namun memiliki kekurangan dalam hal kepatuhan karena sifatnya yang tidak mengikat. Di sisi lain, arbitrase menawarkan kepastian hukum dan kejelasan keputusan, tetapi dapat merusak hubungan bisnis dan melibatkan biaya yang tinggi. Untuk meningkatkan fungsi kedua metode ini, Indonesia harus memperkuat sistem hukumnya, seperti dengan menerapkan konvensi internasional tentang mediasi (Singapore Convention) dan merevisi UU Arbitrase agar memastikan transparansi dan keadilan. Pelatihan bagi negosiator pemerintah juga sangat penting agar perjanjian investasi disusun dengan cara yang mengurangi risiko sengketa.

⁸ Muhammad Rizaldi et al., "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik," *Widya Bhumi*, vol. 3, 2023.

⁹ William and Syailendra, "Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional."

Pada akhirnya, keputusan mengenai mediasi atau arbitrase harus memperhatikan situasi sengketa. Mediasi lebih sesuai untuk kasus yang memungkinkan adanya kesepakatan, sedangkan arbitrase penting ketika kepastian hukum menjadi hal utama. Di Indonesia, perpaduan kedua pendekatan—seperti metode arb-med-arb (arbitrase-mediiasi-arbitrase)—dapat menawarkan alternatif untuk menekan biaya dan mencegah konflik bertambah parah, sekaligus menjaga kedaulatan hukum nasional di tengah perubahan dinamis dalam investasi global.

Peran Mediasi dan Arbitrase dalam Menjembatani Kepentingan Investor Asing dengan Kedaulatan Hukum Indonesia

Mediasi dan arbitrase memiliki peranan krusial dalam menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan prinsip kedaulatan hukum Indonesia.¹⁰ Mediasi, sebagai metode di luar pengadilan, menyediakan ruang diskusi yang fleksibel guna mencapai solusi yang bersifat kolaboratif tanpa merusak otoritas negara dalam menyusun kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam renegotiasi kontrak migas, pemerintah Indonesia berhasil memanfaatkan mediasi untuk menyesuaikan pembagian hasil dengan perusahaan asing, tanpa perlu membatalkan kontrak tersebut sepihak. Proses ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjembatani kepentingan ekonomi investor sambil tetap menjaga kendali negara atas sumber daya alam.

Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada niat baik semua pihak yang terlibat. Tantangan utama terletak pada sifat kesepakatan yang tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga rentan untuk diabaikan apabila terjadi perubahan dalam kebijakan atau tekanan politik dalam negeri. Di Indonesia, kurangnya regulasi yang jelas mengenai mediasi investasi juga melemahkan posisi negara dalam menjamin komitmen dari pihak investor.

Sementara itu, penyelesaian sengketa internasional menawarkan kepastian hukum bagi para investor dengan adanya keputusan yang bersifat mengikat dan diterima secara global. Sistem ini menjadi elemen kunci dalam menarik investasi luar negeri, khususnya melalui ketentuan dalam Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) atau kerangka seperti Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Namun, proses arbitrase berpotensi mengancam kedaulatan hukum Indonesia saat keputusan tersebut bertentangan dengan kebijakan dalam negeri. Sebuah contoh yang konkret adalah kasus *Churchill Mining v. Indonesia*, di mana pemerintah dipaksa untuk membayar kompensasi signifikan setelah kalah dalam perselisihan mengenai pencabutan izin tambang. Kasus tersebut memunculkan kritik bahwa arbitrase internasional cenderung mengesampingkan hak negara dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, ancaman arbitrase dari Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel (UU Minerba 2020) menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan investor dan usaha Indonesia untuk membangun industri hilir nasional.

Kedua mekanisme ini bisa saling melengkapi jika digabungkan dengan cara yang strategis. Mediasi memiliki potensi untuk berfungsi sebagai langkah awal yang dapat mencegah peningkatan sengketa menuju arbitrase, sebagaimana ditetapkan dalam ACIA yang mendorong mediasi sebagai tahap pertama.¹¹ Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk memberikan tawaran kompromi, seperti insentif investasi di sektor hilir, tanpa terikat pada keputusan arbitrase yang mungkin merugikan. Di sisi lainnya, pembaruan dalam sistem arbitrase modern mulai memberikan nilai pada prinsip “hak untuk mengatur”, yang memberikan kesempatan bagi negara untuk membela kebijakan publik selama tidak bersifat diskriminatif. Indonesia dapat memanfaatkan prinsip ini, contohnya, dalam mempertahankan UU Cipta Kerja atau kebijakan lingkungan, asalkan didukung oleh argumen hukum yang kuat.

Tantangan utama muncul dari ketidakseimbangan dalam kemampuan bernegosiasi serta

¹⁰ Penyelesaian Sengketa and Investasi Melalui, “Absensi Prinsip Keadilan Dalam Permasalahan Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase” 8, no. 3 (2023).

¹¹ Soemarto, “Mediasi Dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (Bits) Yang Melibatkan Indonesia.”

ketidakadilan dalam sistem arbitrase, yang masih sangat terpengaruh oleh kepentingan negara-negara maju. Pejabat Indonesia sering kali kalah dalam strategi melawan firma hukum internasional yang mewakili para investor, seperti yang terlihat dalam kasus Renco Group melawan Indonesia yang berkaitan dengan UU Minerba. Selain itu, dorongan global untuk menarik investasi luar negeri sering kali bertentangan dengan semangat nasionalisme ekonomi, seperti yang tercermin dalam kebijakan pembatasan kepemilikan bagi pihak asing atau dalam proses nasionalisasi aset. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia harus memperkuat sistem hukum di dalam negeri, termasuk dengan merevisi UU No. 30/1999 mengenai Arbitrase agar lebih mengakomodasi prinsip-prinsip kedaulatan, serta melakukan ratifikasi terhadap Singapore Convention on Mediation untuk memperkuat aspek hukum dari perjanjian mediasi.

Pada akhirnya, mediasi dan arbitrase tidak sepenuhnya menjadi jawaban, melainkan alat yang harus dikelola dengan cermat. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kemampuan para negosiator, menyusun kontrak investasi yang transparan, dan terlibat secara aktif dalam perombakan norma arbitrase internasional. Dengan cara ini, keseimbangan antara kepentingan investor asing dan kedaulatan hukum dapat tercapai tanpa mengorbankan hak negara dalam melindungi sumber daya alam dan kebijakan strategis lainnya.

KESIMPULAN

Mediasi dan arbitrase berfungsi sebagai dua fondasi kunci dalam menyelesaikan konflik investasi, memiliki keunggulan dan batasan yang saling melengkapi. Mediasi memberikan kemudahan, kecepatan, dan solusi yang bersifat kolaboratif untuk menjaga hubungan antara investor dan negara, meskipun kurang efektif dalam hal kepatuhan karena sifatnya yang tidak mengikat. Di sisi lain, arbitrase menawarkan kepastian hukum melalui keputusan yang wajib dipatuhi, meskipun bisa menimbulkan biaya tinggi, memakan waktu lama, serta mengancam kedaulatan negara. Indonesia perlu memperkuat sistem hukumnya melalui ratifikasi konvensi mediasi dan reformasi UU Arbitrase untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan nasional. Sinergi antara kedua metode, seperti arb-med-arb, serta pengembangan keterampilan negosiator pemerintah, menjadi penting dalam menciptakan suasana investasi yang stabil dan adil di tengah perubahan global.

Mediasi dan arbitrase memiliki peranan penting dalam menyelaraskan kepentingan investor asing dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Mediasi menyediakan alternatif yang fleksibel dan kooperatif (contohnya: renegotiasi kontrak energi), tetapi kurang efektif dalam hal kepatuhan karena sifatnya yang tidak mengikat. Sebaliknya, arbitrase menjamin kepastian hukum (seperti dalam kasus Churchill Mining), namun dapat membahayakan kedaulatan dan memiliki biaya yang tinggi. Indonesia harus memperkuat kerangka hukum (melalui revisi UU Arbitrase dan meratifikasi Konvensi Singapura) serta meningkatkan kemampuan negosiator, sembari mengintegrasikan kedua metode tersebut (misalnya, menjadikan mediasi sebagai langkah awal) untuk meminimalkan konflik. Dengan pendekatan ini, kepentingan investor dan hak negara dalam pengaturan kebijakan publik (seperti UU Minerba 2020) dapat diselaraskan tanpa mengorbankan sumber daya alam atau kestabilan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta. *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Khoirunnisa, Dede, Wagianto, Asriani. "Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi Di Dunia Bisnis Islam." *Media of Law and Sharia* 5, no. 2 (2024): 88–100. <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/73/28>.
- Rini Eka Agustina. "Efektifitas Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 263–72. <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>.

Rizaldi, Muhammad, Dian Aries Mujiburohman, Dwi Wulan Pujiriyani, Alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, and Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik.” *Widya Bhumi*. Vol. 3, 2023.

Sengketa, Penyelesaian, and Investasi Melalui. “Absensi Prinsip Keadilan Dalam Permasalahan Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase” 8, no. 3 (2023).

Soemarto, Leonardo Richo. “Mediasi Dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (Bits) Yang Melibatkan Indonesia.” *Jurnal Darma Agung*, no. 6 (2023): 176–87. <https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3852>.

William, King, and Moody Rizqy Syailendra. “Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional.” *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 1982–90.